Volume 8 Nomor 4 (2025)
ISSN : 2615-0891 (Media Online)

Implementasi Prinsip *Accountability* Dalam Pembiayaan Kegiatan Pendidikan di SD Negeri 1 Ketileng Todanan

Emi Lutfia*, Anora Wanodiya Kurnia, Any Inti Wahyu Setyaningrum, Nurkolis
Universitas PGRI Semarang, Indonesia
*emilutfia59@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how the principle of accountability is applied in financing extracurricular scouting and dance activities at SD Negeri 1 Ketileng Todanan, Blora, and to identify factors that support or hinder the implementation of the principle. This study uses a field method with a qualitative descriptive approach. The data analysis process includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the principle of accountability in financing scouting and dance activities at the school has been carried out well. All stages from planning, implementation, to financial reporting are carried out transparently, accountably, and involve various parties such as schools, committees, and parents of students. Factors that support the implementation of accountability include the existence of clear goals and objectives, a strong institutional structure, targeted policies, and detailed and appropriate planning. Meanwhile, the obstacles faced include a lack of understanding of accountability, the absence of competent administrative staff in financial management, and low participation from the School Committee and parents of students.

Keywords: Accountability; Scouting; Dance Extracurricular Funding; Activities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tari di SD Negeri 1 Ketileng Todanan, Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembiayaan kegiatan pramuka dan tari di sekolah tersebut telah terlaksana dengan baik. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, komite, serta orang tua siswa. Faktor-faktor yang mendukung penerapan akuntabilitas antara lain adalah adanya tujuan dan sasaran yang jelas, struktur kelembagaan yang kuat, kebijakan yang terarah, serta perencanaan yang rinci dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman mengenai akuntabilitas, ketiadaan tenaga administrasi yang kompeten dalam manajemen keuangan, serta rendahnya partisipasi dari Komite Sekolah dan orang tua siswa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pendanaan; Ekstrakurikuler Pramuka; Tari

Pendahuluan

Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana, pemanfaatannya, serta pertanggungjawaban keuangan

di lingkungan sekolah. Pembiayaan pendidikan memegang peranan krusial dalam menjamin kualitas serta efektivitas proses belajar-mengajar (Mulyono, 2020). Dana pendidikan juga adalah salah satu komponen input instrumental yang sangat menentukan dalam upaya membentuk sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan di sekolah (Mulyono, 2020).

Pembiayaan di lingkungan pendidikan memegang peranan penting dalam terciptanya *learning process* yang inovatif, kreatif, aktif, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik. Seorang pemodal yang bisa memberikan kontribusi yang memadai sehingga proses *enseñanza* dan pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Sebelumnya, sejak Juli 2005, pemerintah telah mencanangkan Program Bantuan Sekolah (BOS). Agar pelaksanaannya sangat efisien dan bisa menyesuaikan tujuannya, maka escuelas harus menyajikan informasi mengenai pelaksanaan acara mengenai penggunaan dana secara periodik, setelah kalender ditetapkan. Según Mulyasa (2015) sebelum diimplementasikan, *formulario de rendición de cuentas de la gestioni escolar suele* hadir di *finale del ejercio presupuestario*.

Implementasi prinsip *accountability* dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menjamin adanya tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program. *Accountability* mencakup kewajiban memberikan laporan kepada berbagai pihak, baik dari dalam lembaga seperti guru, murid, dan staf, maupun dari luar seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. *Accountability* berarti kewajiban mempertanggung jawabkan tindakan. Dalam konteks ini, sekolah dituntut untuk bersikap akuntabel, yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan *intern* maupun *extern*, terutama dalam hal pengelolaan keuangan sekolah (Lubis, 2020).

Accountability atau pertanggungjawaban adalah suatu proses untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Ini mencakup pertanggungjawaban atas penerimaan, penyimpanan, dan *disbursement of funds* yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan perencanaan. Secara lebih spesifik, pertanggungjawaban keuangan di sekolah mencakup seluruh proses masuk dan keluarnya dana pendidikan, serta menilai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan rencana awal dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan ber *outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan dicapai.

Menurut Minarti (2021) *accountability* mencerminkan kondisi di mana seseorang dinilai oleh pihak lain berdasarkan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai target yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, menurut Mulyasa (2021), *accountability* dalam pengelolaan keuangan sekolah yang adalah bagian dari implementasi manajemen berbasis sekolah, menuntut adanya laporan pertanggung jawaban pada akhir setiap tahun anggaran. Laporan ini harus disampaikan melalui rapat pengurus sekolah yang melibatkan perwakilan dari sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

SD Negeri 1 Ketileng adalah salah satu contoh sekolah yang tetap bisa beroperasi berkat adanya dana BOS. Sebagai institusi yang mendukung program pendidikan tanpa biaya, sekolah ini cuma mengandalkan dana BOS sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apa sekolah kecil dengan cuma tiga rombongan belajar mampu melaksanakan proses pendidikan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan peraturan yang berlaku? Selain itu, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip *accountability* diterapkan dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan tari di SD Negeri 1 Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang obyektif

terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. *Outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan riset ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, guru, pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang strategi pembiayaan di sektor pendidikan

Metode

Riset ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Ketileng, Todanan, Blora pada tahun ajaran 2024/2025. Riset ini menggunakan metode riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Narasumber dalam studi ini meliputi kepala sekolah, bendahara, serta pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tari. *Data collection technique* meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip *Accountability*

Prinsip *accountability* pertama yang wajib dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dibuat harus terdokumentasi secara tertulis dan bisa diakses oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan. Di SD Negeri 1 Ketileng, perumusan tujuan dan sasaran dilakukan melalui analisis SWOT serta evaluasi terhadap kebutuhan pendidikan saat ini dan proyeksi satu tahun ke depan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan alat penting untuk mengatur tugas dan kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya program atau kegiatan, agar perencanaan selaras dengan pelaksanaan serta menjadi acuan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan berikutnya.

Penentuan program prioritas sendiri dilakukan melalui forum musyawarah dalam rapat dewan guru. Penyusunan anggaran di SD Negeri 1 Ketileng dilakukan berdasarkan tujuan dari setiap kegiatan yang dirancang. Setiap penggunaan dana untuk kegiatan ekstrakurikuler harus mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun sebelumnya. Prinsip *accountability* ketiga yang perlu dijalankan oleh pihak sekolah adalah memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan visi, misi, serta standar yang berlaku di lingkungan sekolah.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun dengan mengacu pada visi dan misi sekolah. Salah satu misi SD Negeri 1 Ketileng adalah mendukung pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu, kepala sekolah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler sejalan dengan arah visi dan misi sekolah. Sebagai ilustrasi, apabila misi sekolah adalah membentuk karakter yang baik, maka dana untuk kegiatan ekstrakurikuler harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut, termasuk dalam hal penyediaan sarana pembelajaran yang sesuai.

Seluruh program disusun berdasarkan visi dan misi sekolah, misalnya visi cerdas dan berakhlak mulia direalisasikan melalui kegiatan seperti pramuka dan tari. SDN 1 Ketileng telah menerapkan prinsip dokumentasi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Hal ini terlihat dari penyusunan RKAS sebagai landasan perencanaan keuangan, pembuatan proposal kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Penetapan sasaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan sekolah memiliki peran yang krusial, karena menjadi acuan dalam menentukan tujuan utama serta prioritas program yang harus dilaksanakan. Setelah sasaran tersebut ditetapkan, pihak sekolah perlu melakukan evaluasi untuk memastikan apa *outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

Salah satu cara untuk menilai efektivitas kebijakan anggaran adalah dengan menelaah rincian anggaran yang diajukan oleh SDN 1 Ketileng. Prinsip *accountability* menuntut setiap pihak yang terlibat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas dan kewenangannya. Dalam pengelolaan dana kegiatan ekstrakurikuler, SDN 1 Ketileng memberikan informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran kepada orang tua murid melalui surat resmi. Prinsip *accountability* keempat yang harus dijalankan oleh sekolah adalah keberadaan mekanisme yang memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan benar-benar tercapai, serta adanya tanggung jawab dan konsekuensi apabila standar tersebut tidak ber *outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan dipenuhi.

Sekolah wajib memenuhi prinsip *accountability* dengan menjaga konsistensi dan memastikan kelayakan terhadap target operasional yang telah ditetapkan serta prioritas pencapaiannya. Di SDN 1 Ketileng, seluruh program dan kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun, tanpa adanya penyimpangan dari program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SDN 1 Ketileng telah ber *outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan memenuhi prinsip *accountability* tersebut, yakni menjaga konsistensi dan kelayakan dalam mencapai target operasional dan prioritas yang telah ditentukan

Secara umum, bisa disimpulkan bahwa implementasi prinsip *accountability* dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kepada para pemangku kepentingan di SDN 1 Ketileng berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat dari dokumentasi yang lengkap untuk setiap penggunaan anggaran ekstrakurikuler, penyampaian informasi yang transparan kepada *stakeholder* terkait kebijakan anggaran sekolah, pelaksanaan sasaran kebijakan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta adanya proses evaluasi anggaran kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya.

Implementasi prinsip *accountability* dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Tari di SDN 1 Ketileng berlangsung dengan efektif. Seluruh tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi aktif dari pihak sekolah, komite sekolah, serta orang tua murid. Dari sisi transparansi, setiap pengeluaran dicatat secara rinci dan informasi keuangan bisa diakses oleh semua pihak terkait. Dalam hal partisipasi, keputusan tentang penggunaan dana diambil melalui musyawarah bersama antara sekolah, komite, dan wali murid. Sedangkan untuk aspek pertanggungjawaban, laporan keuangan disusun secara berkala dan diaudit oleh pihak yang berwenang atau dikaji oleh komite sekolah.

2. Transparansi

Transparansi dalam pembiayaan pendidikan adalah salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilaksanakan secara terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak terkait, seperti orang tua, komite sekolah, dan masyarakat umum. engelolaan dana pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan *accountability* publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat penting untuk membangun kepercayaan dari orang tua murid, masyarakat, serta pemerintah. Untuk mengevaluasi implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan kegiatan ekstrakurikuler di SDN 1 Ketileng, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumen untuk menggali informasi secara mendalam. Data diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS.

Implementasi prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan mengenai sumber dana, penggunaan, serta alokasi anggaran pendidikan. Hal ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah. SDN 1 Ketileng membangun kepercayaan para *stakeholder* dengan membuka informasi secara transparan selama proses perencanaan kegiatan murid setiap tahunnya, termasuk memberikan rincian anggaran yang harus dibayarkan oleh murid setiap tahun.

Menurut Kepala Sekolah SDN 1 Ketileng, keterbukaan dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler diwujudkan dengan melibatkan tim komite sekolah dalam penyusunan biaya pendidikan untuk satu tahun ajaran. Guru dan staf sekolah mengajukan kebutuhan mereka selama satu tahun dan menyusun daftar usulan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Komite sekolah juga turut berperan dalam merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan kegiatan murid. Sementara itu, untuk pihak *extern* seperti pemerintah, perencanaan dana BOS dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Terkait keterbukaan dalam pelaksanaan anggaran di SDN 1 Ketileng, Bendahara Sekolah menjelaskan bahwa proses ini melibatkan guru, staf, dan komite sekolah secara langsung. Mereka melaksanakan anggaran yang telah diajukan kepada pimpinan dengan membelanjakannya sesuai kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tari, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang lengkap disertai dengan kuitansi atau bukti fisik. Keterbukaan yang diterapkan SDN 1 Ketileng dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan bertujuan untuk menginformasikan anggaran yang akan digunakan selama satu tahun ajaran.

Tujuan utamanya adalah agar guru, staf, dan orang tua murid memiliki pemahaman yang sama dan bisa bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan anggaran, keterlibatan para pemangku kepentingan sangat penting agar mereka bisa belajar bertanggung jawab atas keputusan dan pelaksanaan kegiatan. SDN 1 Ketileng memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Bendahara Komite Sekolah, bentuk partisipasi ini meliputi keterlibatan langsung dalam penyusunan anggaran, pengajuan usulan kegiatan, memberikan masukan serta kritik yang konstruktif, serta dukungan baik secara moral maupun materiil. Sejalan dengan pernyataan Ngarno, Kepala SDN 1 Ketileng, bahwa keterlibatan komite sekolah dalam proses penganggaran sangat penting. Partisipasi komite di sekolah dasar (SD) ini berperan krusial untuk menjamin transparansi, *accountability*, serta kesesuaian anggaran dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Berikut beberapa peran dan bentuk keterlibatan komite sekolah dalam proses penganggaran:

a. Memberikan Masukan pada Perencanaan Anggaran

Komite sekolah memberikan saran dan pertimbangan dalam menyusun RKAS, terutama terkait dengan, (a) prioritas kebutuhan sekolah, (b) usulan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, dan (c) efisiensi serta efektivitas penggunaan dana.

b. Sebagai Mitra dalam Musyawarah Sekolah

Komite sekolah dilibatkan dalam rapat musyawarah bersama kepala sekolah, guru, dan pihak terkait untuk, (a) membahas alokasi dana BOS dan sumber dana lainnya, (b) menyetujui atau merevisi rencana anggaran, dan (c) menyampaikan aspirasi orang tua/wali murid serta masyarakat.

c. Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disahkan, komite ikut mengawasi pelaksanaan penggunaan dana sesuai dengan RKAS, menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana kegiatan, serta memberikan laporan atau teguran apabila ditemukan penyimpangan.

d. Transparansi dan Pertanggungjawaban

Komite sekolah turut mendorong dan memfasilitasi keterbukaan informasi dengan cara, (a) meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dari pihak sekolah, (b) menyampaikan informasi penggunaan dana kepada orang tua murid, dan (c) memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang penggunaan dana pendidikan.

Implementasi prinsip transparansi di SDN 1 Ketileng terhadap pemerintah juga terlihat melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak. SDN 1 Ketileng wajib membayar PPh Pasal 21. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara SDN 1 Ketileng, pajak ini secara otomatis dipotong dari gaji guru PNS, PPPK, dan karyawan berpeng outcome atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatanan lebih dari tiga juta rupiah. Pembayaran PPh 21 menjadi bukti konkret dari keterbukaan SDN 1 Ketileng kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan sekolah. Implementasi prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik, didukung oleh struktur kerja yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pertanggungjawaban kegiatan ekstrakurikuler.

Selama proses perencanaan dan pelaksanaan, SDN 1 Ketileng menyediakan informasi tentang anggaran kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama pihak intern seperti Dinas Pendidikan. Sekolah juga sudah menjalankan audit intern. Keputusan anggaran yang berkaitan dengan kenaikan gaji guru dan staf juga mencerminkan keterbukaan sekolah kepada para pemangku kepentingan. *Outcome* atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan riset mengenai implementasi prinsip *accountability* dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tari di SDN 1 Ketileng sejalan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu adanya keterbukaan yang menyeluruh serta memberikan ruang bagi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan keuangan.

Keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan RKAS adalah bentuk partisipasi yang mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Proses penyusunan RKAS dilakukan secara *bottom-up*, sehingga guru dan staf memiliki kesempatan langsung untuk terlibat dalam penyusunan rencana anggaran ekstrakurikuler. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi di SDN 1 Ketileng sudah berjalan dengan cukup baik, yang ditandai dengan keterlibatan kepala sekolah, guru, staf, dan komite dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai dengan prosedur operasional standar sekolah.

3. Dukungan dan Hambatan dalam Implementasi Prinsip *Accountability*

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan prinsip *accountability* mencakup, 1) penetapan tujuan dan target yang spesifik, baik untuk jangka pendek maupun menengah, 2) keberadaan struktur organisasi yang solid guna mendukung terbentuknya sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, 3) kebijakan yang dibuat secara tegas dan memiliki arah yang jelas, 4) perencanaan yang disusun secara realistis, rinci, dan sesuai dengan kebutuhan nyata, 5) pelaksanaan program yang berjalan secara efektif, efisien, serta transparan termasuk dalam aspek pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana, dan pengaturan inventaris, serta 6) sistem pencatatan yang terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait.

Sementara itu, faktor-faktor hambatan dalam implementasi prinsip *accountability* adalah (1) kurangnya pemahaman tentang *accountability*, termasuk di kalangan kepala sekolah dan bendahara, yang mengakibatkan pelaporan dan penggunaan anggaran tidak sesuai prosedur karena kurangnya penguasaan prinsip *accountability*, pelaporan keuangan, dan standar audit, (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kemampuan teknis untuk menyusun laporan keuangan yang benar dan standar, ditambah sekolah yang tidak memiliki tenaga administrasi khusus di bidang manajemen keuangan dan (3) minimnya keterlibatan komite sekolah serta orang tua dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga proses *accountability* berjalan kurang optimal. Dalam beberapa kasus, komite sekolah cuma bersifat formalitas tanpa menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.

Kesimpulan

Outcome atau hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan suatu proses atau kegiatan riset dan analisis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa implementasi prinsip *accountability* dalam pendanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Tari di SD Negeri 1 Ketileng Todanan, Blora telah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator utama. Pertama, adanya transparansi dari pihak sekolah yang terbuka terhadap saran dan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, tim manajemen, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah dalam pengelolaan dan evaluasi keuangan. Kedua, keberadaan standar kinerja yang terstruktur dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab secara profesional. Ketiga, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan turut menciptakan suasana kerja yang mendukung, sehingga layanan pendidikan bisa dilaksanakan sesuai prosedur dengan efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Beberapa faktor yang mendukung implementasi prinsip *accountability* dalam pendanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini antara lain penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, keberadaan struktur kelembagaan yang solid, kebijakan yang terarah dan tegas, penyusunan rencana yang rinci, realistis, serta disesuaikan dengan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan yang efisien, efektif, dan transparan khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa, pengelolaan dana, dan inventarisasi serta sistem pencatatan yang rapi, akurat, dan mudah dimengerti. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi, (1) kurangnya pemahaman tentang *accountability*, termasuk di kalangan kepala sekolah dan bendahara, yang menyebabkan pelaporan dan penggunaan anggaran tidak sesuai prosedur akibat minimnya penguasaan prinsip *accountability*, pelaporan keuangan, dan standar audit, (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dimana sekolah tidak memiliki tenaga administrasi khusus yang menguasai manajemen keuangan dan (3) rendahnya keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Daftar Pustaka

Arwildayanto, L. N., & Warni, T. S. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Matin, & Fuad, N. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. Denpasar: Rajawali Pers.

Minarti, S. (2021). *Manajemen Sekolah: Mengelola Sekolah Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mulyasa, E. (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyono, (2020). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sagala, S. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat*, *Strategi Memenangkan Persaingan Kualitas*. Jakarta: Rakasta Samasta.
Sugiyono, D. (2018). *Metode Riset Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
Sukarno, E. (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Supriadi, D. (2018). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Sutedi, A. (2019). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
Toha, S. (2017). *Riset Masalah Hukum Tentang Implementasi Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.